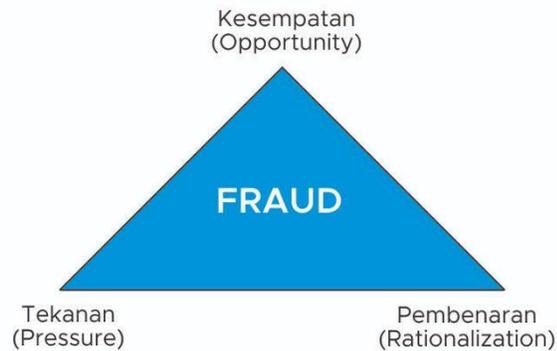


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori *Fraud Triangle*

Teori *Fraud triangle* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Donald R. Cressey (1953) yang dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi fraud, yaitu Tekanan (*pressure*), Peluang (*opportunity*) dan Rasionalisasi (*rationalization*) Susanti (2020 : 23).



Gambar 2.1 *fraud triangle*

Sumber : Cressey, dalam Jefri dan Mediaty (2014)

1. Tekanan (*pressure*)

Tekanan yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan Arens dkk, dalam Susanti (2020:24). Tekanan dapat berupa bermacam-macam termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain. Tekanan paling sering datang dari adanya tekanan kebutuhan keuangan, sebagai contoh penurunan laba mungkin mengancam kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana pembiayaan. Kebutuhan ini seringkali dianggap kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain untuk bersama-sama menyelesaikannya, sehingga harus diselesaikan secara tersembunyi dan pada akhirnya dapat menimbulkan kecurangan.

Menurut SAS No.99 dalam Wahyuni dan Budiwitjaksono (2017:50) terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu :

a. *Financial Stability*

Financial stability adalah keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan stabil. Contoh faktor risiko, perusahaan mungkin memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau profitabilitasnya terancam oleh kondisi ekonomi.

b. *Financial Target*

Financial target adalah tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang dipatok oleh direksi atau manajemen. Contoh faktor risiko, perusahaan mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi prakiraan atau tolak ukur para analis seperti laba tahun sebelumnya.

c. *External Pressure*

External pressure adalah tekanan yang berlebihan bagi manajemen untuk memenuhi persyaratan atau harapan dari pihak ketiga. Contoh faktor risiko, ketika perusahaan menghadapi adanya tren tingkat ekspektasi para analis investasi, tekanan untuk memberikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditur yang signifikan bagi perusahaan atau pihak eksternal lainnya.

d. *Personal Financial Need*

Personal financial need adalah kondisi ketika keuangan perusahaan turut dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Contoh faktor risiko, kepentingan keuangan oleh manajemen yang signifikan dalam perusahaan, manajemen memiliki bagian kompensasi yang signifikan yang bergantung pada pencapaian target yang agresif untuk harga saham, hasil operasi, posisi keuangan, atau arus kas manajemen menajaminkan harta pribadi untuk utang perusahaan.

2. *Peluang (Opportunity)*

Peluang atau kesempatan merupakan situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan (Arens, 2015: 398). Adanya peluang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang tercipta karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau

penyalahgunaan posisi atau otoritas. Peluang dapat terjadi kapan saja sehingga memerlukan pengawasan dari struktur organisasi mulai dari atas. Organisasi harus membangun adanya proses, prosedur dan pengendalian yang bermanfaat dan menempatkan karyawan dalam posisi tertentu agar mereka tidak dapat melakukan kecurangan dan efektif dalam mendeteksi kecurangan seperti yang dinyatakan dalam SAS No.99 organisasi harus membangun adanya proses prosedur dan pengendalian yang bermanfaat dan menempatkan karyawan dalam posisi tertentu agar mereka tidak dapat melakukan kecurangan dan efektif dalam mendeteksi kecurangan seperti yang dinyatakan dalam SAS No.99. SAS No.99 dalam Wahyuni dan Budiwitjaksono (2017:54) menyebutkan bahwa peluang pada *financial statement fraud* dapat terjadi pada tiga kategori kondisi yaitu: *nature of industry, ineffective monitoring, dan organizational structure*.

a. *Nature of Industry*

Nature of industry adalah berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan jauh lebih besar. Contoh faktor risiko, penilaian persediaan mengandung risiko salah saji yang lebih besar bagi perusahaan yang persediaannya tersebar dibanyak lokasi, risiko salah saji persediaan ini semakin meningkat jika persediaan menjadi usang.

b. *Ineffective Monitoring*

Ineffective monitoring adalah keadaan dimana perusahaan tidak memiliki unit pengawasan yang efektif memantau kinerja perusahaan. Contoh faktor risiko, adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya.

c. *Organizational Structure*

Organization structure adalah struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil. Contoh faktor risiko, struktur organisasi yang terlalu kompleks, perputaran personal perusahaan seperti senior manajer atau direksi yang tinggi.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas

perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan pelaporan keuangan yang curang. Contoh faktor risiko, jika CEO atau manajer puncak lainnya sangat peduli pada proses pelaporan keuangan, seperti terus mengeluarkan prakiraan yang terlalu optimistik, pelaporan keuangan yang curang lebih mungkin terjadi Arens dalam Anjani (2020:25). Menurut SAS No.99 rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan siklus pergantian auditor, opini auditor yang didapat perusahaan tersebut serta keadaan total akrual dibagi dengan total aktiva.

2.1.2. Efektivitas

Menurut Mardiasmo, dalam Masitoh (2018:15) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Sedangkan efektivitas yang dikemukakan oleh Ahadi, dalam Sari (2021:9) yaitu suatu organisasi barangkali bias efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat tujuan organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Hasibuan, dalam Sari (2021:9) menyatakan bahwa efektivitas adalah Tercapainya sasaran yang eksplisit dan implisit.

Menurut Siagian (2020:15) pengertian efektivitas ialah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif

apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Rosalina, 2012:25).

Menurut Paramitha (2016:12) efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Selain itu efektivitas diartikan juga sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Menurut Tugiman dalam Paramitha (2016:13) untuk mencapai fungsi audit internal yang efektif terdapat 5 (lima) faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

1. Akses

Berkaitan dengan masalah ketersediaan informasi yang diperlukan oleh internal audit untuk melaksanakan audit. Aksesnya dapat bersumber dari:

- a) Fasilitas, meliputi seluruh realitas fisik yang mungkin dapat memberikan informasi bagi auditor yang melakukan observasi langsung;
- b) Catatan, yang mewakili realitas walaupun bukan realitas itu sendiri;
- c) Orang, terutama bila fasilitas dan catatan kurang mendukung.

2. Objektivitas

Keadaan jiwa yang memungkinkan seseorang untuk merasakan sesuatu realitas seperti apa adanya. Hal tersebut dapat dicapai melalui kesadaran, pengetahuan formal, pengetahuan berdasarkan pengalaman (ketekunan) dan tidak adanya kecondongan emosional.

3. Kebebasan berpendapat

Suatu keadaan yang memungkinkan suatu auditor untuk menyatakan sesuatu yang diketahuinya tanpa rasa takut adanya konsekuensi yang buruk bagi status dan pemisahan organisasional sangat membantu kebebasan berpendapat.

4. Ketekunan

Kualitas yang berasal dari dalam diri auditor sehingga dapat dipengaruhi untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ketekunan dapat diperkuat dengan pemberian isyarat menyangkut maksud atasan sesungguhnya serta status organisasional yang memadai.

5. Ketanggapan

Perhatian auditor terhadap berbagai temuan dan pembuatan keputusan. Adanya tindakan korektif bila dipandang perlu. Ketanggapan sangat dipengaruhi oleh status organisasional internal audit

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multi-dimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi, suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut (Rosalina, 2012:28).

2.1.3 Ukuran Efektivitas

Menurut Rosalina (2012:30) Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektifitas tidak

menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Budiani dalam Sari (2021:15) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Ketepatan sasaran program
Sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program
Kemampuan penyelenggara program di dalam melakukan sosialisasi program maka informasi mengenai pelaksanaan program bisa tersampaikan untuk masyarakat pada umumnya serta sasaran peserta program pada khususnya.
- c. Tujuan program
Sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantuan program
Segiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Rumus Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = (\text{Output Aktual} / \text{Output Target}) \geq 1$$

Bila hasil perbandingan *output* aktual dengan *output* target < 1 maka efektivitas tidak tercapai.

Bila hasil perbandingan *output* aktual dengan *output* target ≥ 1 maka efektivitas tercapai.

Menurut Rosalina (2012:35) Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

Strees mengemukakan kriteria pengukuran efektivitas dalam Mustofa (2015:17)

yaitu :

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan adaptasi kerja
- c. Kepuasan kerja
- d. Kemampuan berlaba
- e. Pencarian sumber daya

Menurut Wahyuni (2020:31) yang mengembangkan model proses dalam menilai efektivitas organisasi dengan menggunakan tiga sudut pandang. Unsur atau dimensi yang pertama ialah optimasi tujuan yang akan dicapai, yaitu apabila beberapa bagian dari tujuan itu mendapat perhatian atau alokasi sumber dana dan daya yang lebih besar. Yang kedua yaitu berkaitan dengan interaksi antara organisasi dengan keadaan sekeliling. Selanjutnya ialah penekanan pada aspek perilaku yang telah memusatkan perhatian pada pentingnya peranan perilaku manusia dalam proses pencapaian tujuan organisasi dan dalam aktivitas suatu organisasi. Adapun beberapa contoh efektivitas dalam lingkungan organisasi diantaranya;

1. Seorang karyawan *customer service* diharapkan dapat melayani 10 pelanggan setiap harinya. Pada kenyataannya karyawan tersebut dapat melayani 11 pelanggan per hari, maka karyawan tersebut dianggap memiliki efektivitas yang baik.
2. Seorang manajer membawahi 20 orang pegawai dan harus membagi tugas/pekerjaan masing-masing pegawai tersebut. Pada kenyataannya manajer tersebut tidak dapat menentukan orang terbaik di suatu posisi, maka manajer tersebut dianggap tidak memiliki efektivitas yang baik.
3. Sebuah mesin *foto copy* melayani 20 orang pegawai dan diharapkan dapat meng-copy 500 kertas per hari. Pada kenyataannya mesin *foto copy* tersebut dapat meng-copy lebih dari 500 kertas per hari, maka mesin tersebut dianggap efektif.

2.1.4 Kecurangan (Fraud)

Fraud menurut SPA 240 yang diterbitkan IAPI adalah sebagai berikut, “*Fraud* adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. *Statement on Auditing Standards* No.99, dalam Siregar dan Kennedy (2017:17) mendefinisikan: *Fraud is an intentional act that results in a material misstatement in financial statements that are the subject of an audit*. Sedangkan menurut *the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *fraud* adalah suatu tindakan penipuan atau kekeliruan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan pihak lain

Sehingga, untuk mencapai kinerja yang baik tersebut tentu akan ada faktor-faktor yang mendorongnya, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Begitu pula halnya dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Menurut Sugianto, dalam Putri (2020:13) Kecurangan yang berhubungan dengan pelaporan keuangan menyangkut tindakan :

1. Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan;
2. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan ;
3. Salah penerapan secara prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian dan pengungkapan.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan *fraud* terjadi apabila terdiri dari unsur-unsur berikut ini:

1. Korban *fraud* menderita kehilangan hak milik atau uang karena telah mempercayai dan bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru tersebut.
2. Adanya unsur kesengajaan dari individu atau organisasi untuk membuat penyajian yang keliru mengenai peristiwa atau fakta yang penting.
3. Adanya kerugian atau keuntungan dalam jumlah material bagi perusahaan atau instansi pemerintahan.

Uniform Occupational Fraud Classification System The ACFE, dalam Siregar dan Kennedy (2017:3) membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

- a) Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*)
Asset Misappropriation meliputi penyalahgunaan / pencurian aset atau harta atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur / dihitung (*defined value*).
- b) Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);
Fraudulent Statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintahan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial*

engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

c) Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak yang terjadi di negara-negara yang berkembang yang penegakkan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama yang menikmati keuntungan (*symbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/ illegal (*illegal gratuities*) dan pemerasan secara ekonomi (*econom extortion*). Sedangkan The ACFE (2012) menambahkan satu lagi tipologi *fraud* yaitu *cybercrime*. Ini jenis *fraud* yang paling canggih dan dilakukan oleh pihak yang mempunyai keahlian khusus yang tidak selalu dimiliki oleh pihak lain. *Cybercrime* juga akan menjadi jenis *fraud* yang paling ditakuti dimasa depan dimana teknologi berkembang dengan pesat dan canggih.

2.1.5 Indikator Kecurangan (*fraud*)

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kecurangan sebagai akibat antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungannya yang memungkinkan untuk bertindak (Wahyuni, 2020:36).

Indikator Pendeteksian Kecurangan menurut Kumaat dalam Tobe (2017:17) indikator pendeteksian kecurangan adalah:

- a. Memiliki keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*)
- b. Memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi
- c. Memiliki keakuratan dan kecermatan (*accuracy*)

Menurut Dewi (2020:24) Berikut faktor-faktor yang mendasari *fraudster* pelaku *fraud* dalam melakukan tindak kecurangan berdasarkan pentagon fraud theory:

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah kondisi dimana individu atau suatu kelompok dihadapkan pada suatu kondisi yang pada akhirnya memotivasi untuk melakukan kecurangan. Beberapa contoh dari kondisi yang dapat melatar belakangi seseorang melakukan *fraud* adalah seperti kurangnya nominal penghasilan yang diperoleh, kebutuhan hidup yang besar, dan gaya hidup yang tinggi. Tekanan juga dapat timbul dari adanya tuntutan dari entitas yang membawahi, seperti tekanan yang dirasakan oleh manajemen untuk dapat menyajikan kondisi perusahaan yang stabil atau bahkan mengalami peningkatan.

b. Peluang (*Opportunity*)

Peluang didefinisikan sebagai ketersediaan kesempatan bagi seseorang untuk berbuat kecurangan. Peluang dapat timbul didorong dari kurang berjalannya sistem pengendalian internal yang efektif dalam suatu instansi sehingga dapat menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan *fraud* yang dapat menguntungkan dirinya.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi mengandung makna bahwa dalam melakukan tindakan *fraud*, seseorang cenderung mencari alasan untuk membenarkan setiap aktivitas kecurangan yang dilakukan karena mereka tidak ingin kecurangan yang telah dilakukan diketahui oleh orang lain. Pembenaran ini dilakukan karena pelaku *fraud* memiliki keinginan dalam dirinya untuk tetap berada pada situasi aman dan terbebas dari segala tuntutan hukuman (*risk averse*).

d. Kompetensi (*Competence*)

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk dapat melakukan tindak kecurangan. Wolfe dan Hermanson, dalam Dewi (2020:25) mengungkapkan bahwa kecurangan tidak dapat terjadi apabila tidak didukung dengan adanya kemampuan yang memadai dari pelaku kecurangan atas setiap detail aktivitas kecurangan yang dilakukan. Selain itu, kompetensi dikaitkan dengan posisi atau jabatan yang dimiliki oleh pelaku *fraud* sebagai upaya untuk mempermudah praktik kecurangan yang dilakukan Dewi (2020:28). Adapun jabatan yang dimaksud adalah mereka yang berada pada tingkatan atas seperti CEO, direksi, dan kepala departemen. Kecurangan yang dilakukan dalam

jumlah nominal yang besar sesungguhnya tidak jauh dari peran seseorang dengan jabatan yang tepat didukung dengan kemampuan yang mumpuni.

e. Arogansi (*Arrogance*)

Arogansi menjadi elemen baru pada teori *fraud pentagon*. Arogansi merupakan sikap angkuh dimana individu memiliki pandangan bahwa kontrol internal, kebijakan-kebijakan, dan hal-hal pengaturan lainnya dalam suatu instansi tidak berlaku bagi dirinya, sehingga timbul adanya perasaan bebas dan tidak bersalah atas setiap praktik kecurangan yang dilakukan. Sifat ini timbul dari adanya sikap mementingkan diri sendiri yang kemudian memicu persepsi diri bahwa tindakan *fraud* yang dilakukan tidak akan diketahui orang lain dan sanksi yang ada tidak berlaku bagi pelaku *fraud*. Bahkan para pelaku *fraud* tidak akan merasa takut akan kehilangan posisi dan status setelah melakukan *fraud*.

2.1.6. Internal Audit

Menurut Pontoh, dalam Wahyuni (2020:6) audit merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan dengan aturan yang telah diatur dan juga untuk menyampaikan hasil untuk pihak yang memiliki kepentingan dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi. Selanjutnya, menurut Margaret, dalam Wahyuni (2020:7) audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan:

- a) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
- b) Risiko yang dihadapi perusahaan atau instansi pemerintahan telah diidentifikasi dan diminimalisasi;
- c) Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti;
- d) Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
- e) Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan

- f) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.

Dalam arti luas audit atau pemeriksaan memiliki makna evaluasi suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak. Tujuannya untuk memverifikasi bahwa subjek yang telah diaudit diselesaikan sesuai dengan standart, regulasi dan praktik yang telah disetujui dan diterima (Syahputra dan Afnan, 2020:26).

Berdasarkan pemaparan diatas audit internal merupakan kontrol yang membantu pihak manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Audit internal mencakup jasa pemeriksaan, penilaian resiko, kinerja perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Audit internal dapat memberi petunjuk bahwa audit memiliki peran dan penilaian kualitas yang dapat membantu penilaian pengendalian internal suatu entitas atupun organisasi (Putri, 2020:19). Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dalam Standar Profesi Audit Internal (2004) menjelaskan auditor internal mempunyai peran untuk mengevaluasi dan memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistim manajemen risiko, kontrol, dan *governance*. Dalam menjalankan perannya sebagai konsultan, auditor internal dapat membantu organisasi melakukan identifikasi, evaluasi dan implementasi proses pengelolaan risiko. Audit internal juga bertanggung jawab untuk membantu pencegahan fraud dengan jalan melakukan pengujian kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, dengan jalan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial telah diidentifikasi. Kumaat dalam Putri (2020:36) menyatakan terdapat tiga peran audit internal, yaitu :

- a. Peran analisis/penelaah data berbasis risiko bisnis;
- b. Peran akselerator/pendorong terwujudnya pengawasan melekat;
- c. Peran penyelarar/perekat strategi bisnis.

Menurut Tugiman dalam Paramitha (2016:11), peran yang dijalankan auditor internal dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. *Watchdog*

Watchdog adalah peran tertua dari audit internal yang mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, menghitung dan cek dan ricek. Adapun tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Proses audit yang dilakukan adalah audit kepatuhan. Focus pemeriksaanya adalah adanya variasi atau penyimpangan dalam sistem pengendalian internal. Audit kepatuhan mengidentifikasi penyimpangan sehingga dapat dilakukan koreksi terhadap sistem pengendalian internal. Oleh karena sifat pekerjaanya, peran *watchdog* biasanya akan menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka pendek.

2. Konsultan

Melalui peran ini, manajemen akan melihat bahwa selain sebagai *watchdog*, audit internal dapat memberikan manfaat lain berupa saran dalam pengelolaan sumber daya organisasi yang dapat membantu tugas para manajer. Peran konsultan membawa internal audit untuk selalu meningkatkan pengetahuan baik tentang profesi auditor maupun aspek bisnis, sehingga dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah.

3. Katalis

Katalis adalah suatu zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi namun tidak ikut bereaksi. Peran auditor internal sebagai katalisator yaitu memberikan jasa kepada manajemen melalui saran-saran konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi kemajuan perusahaan namun tidak ikut dalam aktivitas operasional perusahaan.

2.1.7. Jenis-jenis Audit

Adapun beberapa jenis audit yang diantaranya seperti:

1) Audit kinerja

Audit yang dilakukan oleh auditor untuk mengetahui seberapa efisien dan efektifnya kegiatan operasional pada suatu perusahaan. Dalam hal ini seorang auditor diharapkan bisa melakukan pengamatan yang obyektif dan hasilnya komprehensif terhadap kegiatan operasional pada perusahaan atau entitas. Audit kinerja dilakukan untuk mendapatkan sekaligus mengevaluasi bukti-bukti yang telah ditemukan dengan tujuan untuk mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut.

2) Audit laporan keuangan

Audit yang dilakukan oleh auditor terhadap laporan-laporan keuangan pada suatu perusahaan, apa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau belum. Hasil dari audit ini nantinya akan disampaikan kepada pihak eksternal misalnya seperti para pemegang saham perusahaan tersebut.

3) Audit kepatuhan

Audit yang dilakukan untuk melihat kegiatan pada suatu perusahaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan, peraturan dan persyaratan yang berlaku misalnya seperti perjanjian yang telah ditetapkan dan apakah telah sesuai dengan undang-undang pada suatu negara. Kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan pada audit ini, berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Misalnya bersumber dari manajemen yang berbentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit ini umumnya disebut dengan fungsi audit internal karena dilakukan oleh pegawai pada perusahaan tersebut (Wahyuni, 2020:8).

2.1.8. Standar Profesional Audit Internal

Menurut Masturoh, *et al* (2020:4) Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut, Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal menerbitkan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI). Standar Profesi Audit Internal ini merupakan awal dari serangkaian Pedoman Praktik Audit Internal (PPAI), yang diharapkan menjadi sumber rujukan bagi internal auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional. Standar Profesi Audit Internal (SPAI) terdiri atas Standar Atribut, Standar Kinerja dan Standar Implementasi.

a. Standar Atribut

Berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal.

b. Standar Kinerja

Menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar Kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan

audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar Atribut dan Standar Kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal.

c. Standar Implementasi.

Hanya berlaku untuk satu penugasan. Standar Implementasi yang akan diterbitkan di masa mendatang adalah :

- 1) Standar implementasi untuk kegiatan *assurance* (A)
- 2) Standar implementasi untuk kegiatan *consulting* (C),
- 3) Standar implementasi kegiatan investigasi (I)
- 4) Standar implementasi *Control Self Assessment* (CSA).

Standar-standar tersebut merupakan bagian dari pedoman praktik audit internal (PPAI). Keseluruhan pedoman praktik audit internal terdiri atas: Definisi Audit Internal Kode Etik Profesi Audit Internal Standar Profesi Audit Internal dan Interpretasi dari Standar Profesi Audit Internal. Menurut Hery (2016:266-276) Standar Profesional Audit Internal terbagi atas empat macam diantaranya yaitu :

1. Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian audit internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para audit internal. Status organisasi audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi audit internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal.

2. Kemampuan Professional

Audit internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional. Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum, yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Pimpinan audit internal harus dapat memberikan

jaminan atau kepastian bahwa secara teknis latar belakang pendidikan dari para pemeriksa internal telah sesuai dengan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Walaupun demikian, masing-masing anggota di bagian audit internal tidak perlu memiliki kualifikasi dalam seluruh disiplin ilmu tersebut.

3. Lingkup pekerjaan

Lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan peninjauan terhadap kecukupan dan keefektifan suatu sistem pengendalian internal adalah untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien, ekonomis, serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan tugas pemeriksaan.

Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang atau auditor yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Wahyuni (2020:32) dalam melaksanakan audit faktor-faktor berikut harus diperhatikan:

- 1). Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut.
- 2). Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggung jawab auditor.
- 3). Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit.

- 4). Kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.

2.1.9. Tujuan Internal Audit

Menurut Sawyer (2017:50) audit internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab secara efektif. Audit internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan atau pemerintahan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan atau pemerintahan. Audit internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan atau pemerintahan dan resiko-resiko terkait dalam menjalankan usaha atau suatu pemerintahan. Menurut Barus (2017:16) tujuan dari internal audit :

- a. Membantu manajemen untuk mendapatkan administrasi perusahaan yang paling efisien dengan memuat kebijaksanaan operasi kerja perusahaan.
- b. Menentukan kebenaran dari data keuangan yang dibuat dan keefektifan dari prosedur internal.
- c. Memberikan dan memperbaiki kerja yang tidak efisien.
- d. Membuat rekomendasi perubahan yang diperlukan dalam beberapa fase kerja.
- e. Menentukan sejauh mana perlindungan pencatatan dan pengamanan harta kekayaan perusahaan terhadap penyelewengan.
- f. Menentukan tingkat koordinasi dan kerjasama dari kebijakan manajemen.

Tujuan dan fungsi audit internal ialah memeriksa, menilai, mengawasi, dan membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Syahputra dan Afnan, 2020:25).

2.1.10. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2016:221), unsur pokok sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, piutang, pendapatan dan biaya.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya.

Hery (2014:90), laporan COSO mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal yang saling berkaitan:

1. Lingkungan pengendalian

Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi entitas tersebut.

2. Penilaian resiko

Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Aktivitas pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur ini terdiri atas :

- a. Pemisahan tugas
- b. Otorisasi yang tepat atas transaksi
- c. Dokumen dan catatan yang memadai
- d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
- e. Pemeriksaan independen atau verifikasi internal

4. Informasi dan komunikasi

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi, yaitu :

- a. Transaksi yang dicatat memang ada
 - b. Transaksi yang ada sudah dicatat
 - c. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar
 - d. Transaksi yang dicatat di-posting dan diikhtisarkan dengan benar
 - e. Transaksi diklasifikasikan dengan benar
 - f. Transaksi dicatat pada tanggal yang benar
5. Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan. Apabila pengendalian internal tidak dijalankan dengan baik, maka dapat terjadi manipulasi (*fraud*). Menurut Ardana dan Hendro (2015:200), suatu tindakan disebut bersifat manipulatif jika memenuhi 5 kondisi sebagai berikut:

1. Penyajian palsu, artinya harus ada penyajian, atau pernyataan, atau pengungkapan palsu, atau ada sesuatu yang tidak diungkapkan,
 2. Fakta material, suatu fakta harus cukup substansial sehingga mendorong seseorang untuk bertindak,
 3. Ada niat, ada maksud yang disengaja untuk menipu atau ada kesengajaan bahwa informasi yang disampaikan adalah palsu,
 4. Keterandalan yang dijustifikasi, pernyataan palsu hendaknya menjadi suatu faktor yang substansial yang dipercaya oleh pihak yang dirugikan.
 5. Kerugian, penipuan menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang menjadi korban. Suatu prosedur yang baik adalah bila memenuhi syarat-syarat pengendalian sebagai berikut :
1. Setiap dokumen harus diberi nomor urut tercetak sebelumnya.
 2. Adanya mekanisme verifikasi oleh pejabat yang ditunjuk, dan adanya mekanisme uji silang antar pejabat, atau antar bagian untuk memastikan setiap dokumen transaksi telah diuji, atau diverifikasi oleh lebih dari satu orang yang

menyangkut keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan suatu dokumen sebelum sampai ke bagian akuntansi.

3. Adanya bagan alir dokumen yang baik yang mencerminkan kejelasan aliran dokumen dan ketepatan waktu setiap dokumen sampai ke bagian akuntansi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Analisis	Hasil
Susianti dan Edison (2017)	Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal	Efektivitas, audit internal, sistem pengendalian internal	Regresi linear sederhana	Kualitas auditor internal dalam proses pelaksanaan pemeriksaan intern ditentukan oleh independensi, keahlian professional, lingkup kinerja, dan pelaksanaan kinerja pemeriksaan
Sari (2020)	Peran dan kualitas audit internal dalam efektivitas sistem pengendalian internal pada pembangunan Kota Medan .	Internal audit, sistem pengendalian internal, Efektivitas	Regresi linier sederhana	Efektivitas internal audit dalam mencegah kecurangan dalam sistem pengendalian internal berpengaruh positif
Barus (2017)	Pengaruh audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada PT. Indonesia Alumunium Kuala Tanjung	Audit Internal, Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan	Regresi linier sederhana	Secara keseluruhan dari pengendalian internal, audit internal berpengaruh positif dalam pencegahan kecurangan
Wahyuni (2020)	Peran audit internal dalam mengatasi fraud pada Pemerintah Kota Makassar	Internal audit, fraud	Regresi linear berganda	Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah internal audit pada Kantor Pemerintah Kota Makassar berperan penting dan berperan baik dalam mengatasi <i>fraud</i> .

Fitriani (2018)	Efektivitas Pelaksanaan Program Beras Sejahtera Di Kelurahan Tulo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto	a. Tepat sasaran b. Tepat jumlah c. Tepat harga d. Tepat waktu e. Tepat kualitas f. Tepat	Regresi linear sederhana	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser berjalan efektif 63,8% dan tidak ada faktor penghambat dalam program beras sejahtera di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser.
Ulupui et al, (2020)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, dan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Mendeteksi Kecurangan	Variabel pengalaman auditor, variabel teknik audit berbantuan komputer (TABK), variabel efektivitas pelaksanaan audit investigative	Regresi linier berganda	Independensi auditor, pengalaman auditor, dan penerapan TABK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan audit investigatif dalam mendeteksi kecurangan.
Rosiana (2019)	Pengaruh Kompetensi Auditor Independen dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Pendeteksian Fraud	Variabel tekanan anggaran waktu, dan objek penelitian yakni auditor independen.	Regresi linier berganda	Kompetensi auditor berpengaruh terhadap deteksi fraud oleh auditor, dan tekanan anggaran waktu tidak memiliki pengaruh terhadap deteksi fraud oleh auditor
Hajering dan Dahlia (2019)	Pengaruh Pengalaman, Independensi, dan Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Fraud	Variabel pengalaman auditor, penggunaan alat statistic	Regresi linier sederhana	Pengalaman auditor, independensi auditor, dan skeptisme profesional auditor berpengaruh positif dan

				signifikan terhadap pendeteksian fraud.
Nurlatifah (2019)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Gender, dan Pengetahuan Mendeteksi Fraud terhadap Audit Judgement	Variabel gender, pengetahuan mendeteksi fraud dan audit judgement, responden auditor di KAP Jakarta timur	Regresi linier berganda	Pengalaman kerja, gender, dan pengetahuan dalam mendeteksi fraud berpengaruh positif terhadap audit judgement.
Nurazizah (2017)	Pengaruh Gender dan Pengalaman terhadap Skeptisme Profesional Auditor (Studi Empiris Pada Auditor di Kantor Akuntan Publik Kota Padang)	Variabel gender auditor pengalaman, Skeptisme profesional,	Regresi linear sederhana	Pengalaman berpengaruh terhadap skeptisme profesional, auditor wanita lebih skeptis dibanding auditor pria, tidak ada perbedaan skeptisme yang signifikan antara auditor yang berpengalaman dengan yang belum berpengalaman.
Noviani dan Sambharakresha (2014)	Pencegahan Dan Kecurangan Dalam Organisasi Pemerintahan	Variabel pengetahuan auditor mendeteksi <i>fraud</i> dan pencegahan <i>fraud</i>	Regresi linier sederhana	Peran auditor dalam mendeteksi dan pencegahan <i>fraud</i> berpengaruh positif dalam organisasi pemerintahan.

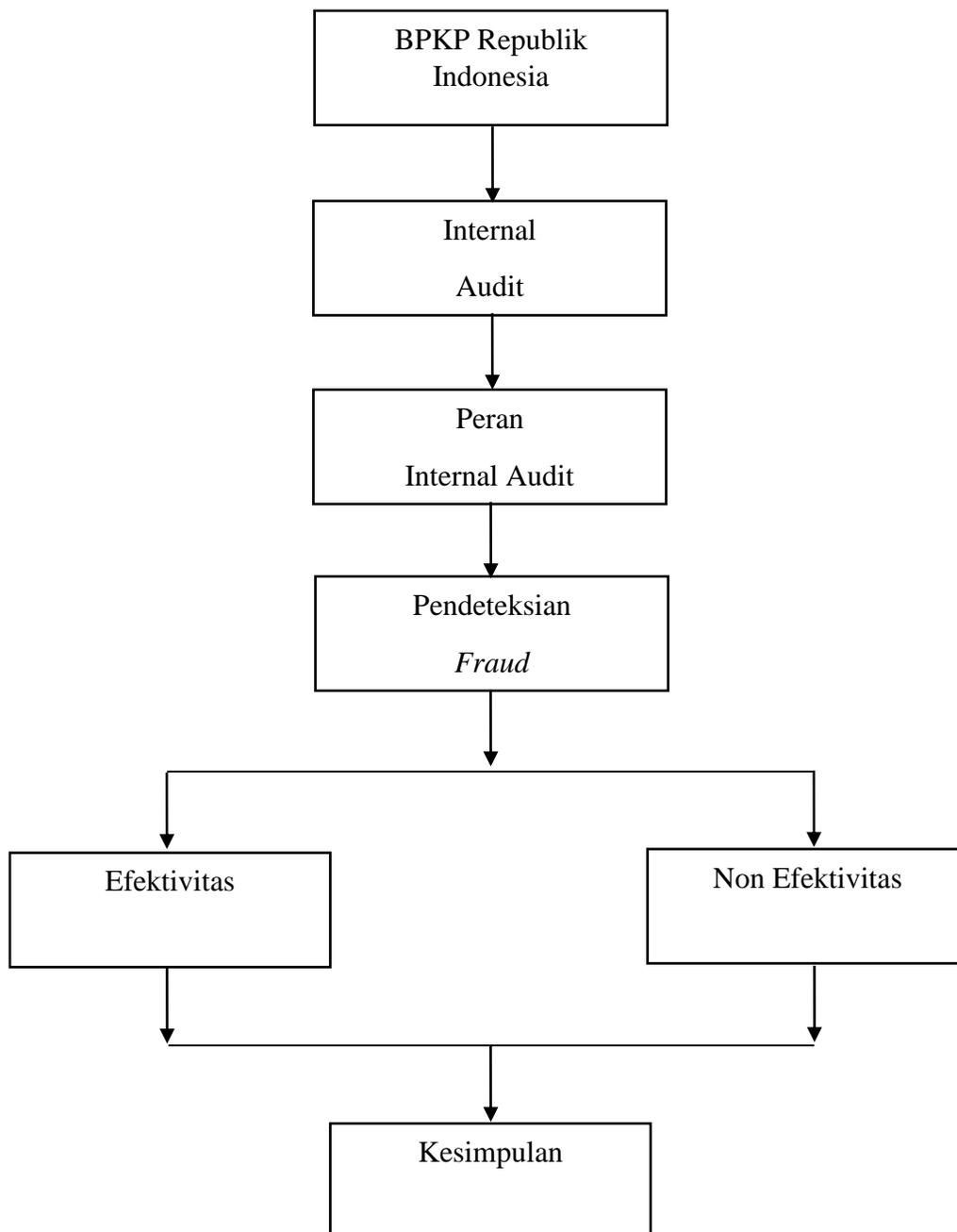
Sumber : Penelitian Terkait 2022.

2.3. Kerangka Pemikiran

Audit internal sangat penting bagi perusahaan untuk membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan yang baik dan ditujukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya audit internal memiliki peranan yang penting sebagai alat kontrol perusahaan (Indah, 2020:33). Peran audit internal akan berjalan baik jika seorang auditor memiliki kualitas yang mempunyai yang berkaitan dengan kemampuan profesionalisme. Hal ini sesuai dengan pendapat Syahputra (2019:34) kemampuan profesional yang harus dimiliki audit internal diantaranya personalia,

pengetahuan dan kecakapan, dan pengawasan. Di dalam kemampuan professional mewakili unsur-unsur yang dapat dilaksanakan kegiatan audit internal secara efektif.

Menurut Sukrisno (2017:6) menerangkan mengenai *fraud* yaitu kecurangan (*fraud*) dapat didefinisikan suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau orang-orang dari dalam dan atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Demikian, apabila departemen audit internal dapat melaksanakan peranannya dengan baik, praktek kecurangan yang ada dapat diungkap dan nantinya dapat mencegah kemungkinan terulangnya tindak kecurangan tersebut kembali ke masa depan.



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Penulis (2022)